

## **OMBUDSMAN INGATKAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA JANGAN ASAL TUNJUK PEJABAT**

**Senin, 01 Maret 2021 - Marisya Fadhila**

Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dan para kepala daerah yang baru dilantik tak bisa asal ganti atau asal tunjuk pejabat baru.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan proses penunjukan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) oleh kepala daerah mesti jelas indikatornya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani menyebutkan kepala OPD yang ditunjuk harus punya kompetensi. Pengisian jabatan pun mesti sesuai dengan aturan yang ada.

"Jangan salah gunakan wewenang untuk pengisian posisi kepala OPD atau struktur yang lain," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri acara pelantikan kepala daerah, Jumat (26/2/2021).

Kepala daerah, tutur Yefri, tidak boleh menempatkan posisi kepala OPD kepada seseorang berdasarkan faktor kedekatan. Hal itu guna mencegah terjadinya maladministrasi pelayanan publik.

"Karena pimpinan OPD itu merupakan role model untuk perubahan atau perbaikan pelaksanaan pelayanan publik itu," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan penunjukan kepala OPD harus mempertimbangkan bagaimana pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.

"Itu yang harus diperhatikan. Dia betul-betul punya kemampuan mengelola OPD itu. Menempatkan orang pada tempat yang pas," sampainya. [pkt]